

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena rata-rata masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%. Yaitu ditahun 2015 sebesar 6,29%, tahun 2016 sebesar 6,25%, tahun 2017 sebesar 10,43%, tahun 2018 sebesar 4,58%, tahun 2019 sebesar 4,29%.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar: 8,15, 7,51, 13,71%, 6,88%, dan 5,09%.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Pemerinta Kabupaten Kupang pada tahun 2015 sangat efektif karena nilai yang diperoleh di atas 100% yaitu 107,42%. Untuk tahun 2016 tidak efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 74,22%. Tahun 2017-2018 kuang efektif karena nilai yang diperoleh antara 75%-89%. Dan untuk tahun 2019 tidak efektif karena nilainya sebesar 49,18%.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui pada tahun 2015 tergolong cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Tahun 2016 dan 2017 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 efisiensinya tergolong Cukup Efisien. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah cukup stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 49,23%-63,79%. Untuk belanja modal berada pada kisaran 36,21-50,77%.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi Teoritis sebagai berikut

1. Menurut Halim (2007: 24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
2. Penelitian tentang Kinerja Keuangan dengan menggunakan rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Kupang dengan hasil penelitian jika dilihat dari ke lima Rasio yang dipakai, disini menunjukkan bahwa pada rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang karena rata-rata total PAD hanya menyumbang 6,37% dari total pendapatan daerah. Pada rasio kemandirian menunjukan bahwa masih bergantung dari bantuan pusat

dengan rata-rata PAD 8,27%. Pada rasio efektifitas PAD menunjukkan bahwa kurang efektif karena rata-rata besarnya rasio sebesar 78,46%. Pada rasio efisiensi realisasi belanja daerah lebih besar dari realisasi pendapatan sebesar 98,51 menunjukkan bahwa keuangan daerah kurang efisien. Pada rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan sebagian anggaran belanja operasi yaitu rata-rata sebesar 54,68% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 44,92%.

3. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Puput Risky Pramita dengan judul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas PAD dapat dikategorikan efektif, karena rata-rata efektifitasnya sebesar 105,46%, rasio efisiensi tergolong efisien karena rata-rata rasio sebesar 99,82%, rasio keserasian Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,79% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16.6%, rasio pertumbuhan mengalami fluktuatif, rasio kemandirian masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif karena rata-rata rasio sebesar 7,80%.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dengan diketahuinya Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten Kupang yang sangat kurang karena kurangnya kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Saran peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Kupang lebih mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan (pajak dan retribusi daerah) yang ada di Kabupaten Kupang untuk dapat meningkatkan PAD, .

2. Dengan diketahuinya Rasio Kemandirian Daerah yang belum begitu baik karena Kabupaten Kupang masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Saran peneliti agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk mengefektifkan sektor pembangunan dan mengolah potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
3. Dengan diketahuinya Rasio Efektifitas yang kurang efektif pada Kabupaten Kupang. Saran peneliti adalah agar Pemerintah Kabupaten Kupang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah untuk meningkatkan PAD, diperlukan kreatifitas perangkat daerah dalam mencari alternatif-alternatif untuk menjadi sumber-sumber penerimaan baru.
4. Dengan diketahuinya Rasio Efisiensi pada Kabupaten Kupang yang tergolong kurang efisien perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkecil selisih antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Saran peneliti agar Pemerintah Kabupaten Kupang dapat meminimalisir jumlah belanja dengan menyesuaikan dengan pendapatan sehingga kedepannya dapat meningkatkan efisiensi belanja daerah.
5. Dengan diketahuinya Rasio Keserasian pada Kabupaten Kupang bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih

diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat. Saran peneliti agar kedepannya Pemerintah Kabupaten Kupang lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dengan mengurangi dana operasional yang dipergunakan untuk memenuhi aktifitas pemerintahan.